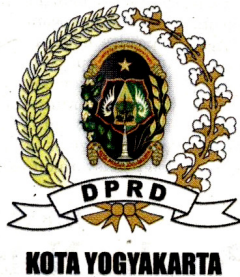




WAKIL KETUA I DPRD KOTA YOGYA, SINARBIYAT NUJANAT
Telaah Regulasi Pajak Homestay untuk Perkuat PAD



menelaah regulasi terkait penarikan pajak bagi homestay maupun guest house.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat tren wisatawan yang kini mulai bergeser dari hotel konvensional ke penginapan berbasis hunian warga.

Sinarbiyat mengungkapkan bahwa selama musim Lebaran kali ini, tingkat okupansi hotel di Yogyakarta diprediksi penuh atau overkapasitas. Kondisi ini mendorong wisatawan mencari alternatif lain, yakni homestay atau guest house.

„Ada beberapa alasan kuat mengapa jenis penginapan ini kian diminati. Mulai dari ketersediaan kamar, harga yang kompetitif serta masalah privasi dan kenyamanan,“Au terangnya.

Sehingga ketika hotel-hotel sudah habis dipesan maka pondokan yang menerapkan sistem sewa harian sering menjadi alternatif. Tidak sedikit pondokan yang menerapkan sistem sewa harian. Apalagi tarif yang ditawarkan cenderung lebih rendah dibandingkan

YOGYA (KR) - hotel berbintang. Di samping itu, banyak wisatawan keluarga yang memilih guest house karena alasan privasi dan suasana yang lebih rumahan.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, persoalan muncul karena selama ini homestay secara regulasi masih sering disetarakan dengan pondokan. Hal ini menyebabkan sektor tersebut kerap luput dari objek pajak daerah. "Secara regulasi, homestay masih dianggap sebagai pondokan. Padahal, secara praktik, aktivitasnya sudah bersifat komersial murni layaknya jasa perhotelan. Ada potensi pendapatan daerah yang besar di sana yang selama ini belum tergarap maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Sinarbiyat menekankan bahwa di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih kreatif dan tegas dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, pajak dari sektor homestay dan guest house bisa menjadi instrumen penting untuk menambah ruang fiskal daerah. Hasil dari pajak tersebut nantinya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata maupun layanan publik lainnya.

Dirinya berharap eksekutif segera melakukan kajian mendalam terkait payung hukum ini, agar terjadi keadilan iklim usaha antara pengusaha hotel yang taat pajak dengan penyedia jasa penginapan alternatif.

(Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005